

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

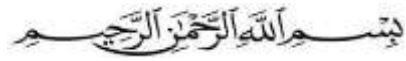
WANDA PUTRA

NPM: 1801280019



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PERSEMBAHAN



*Dengan penuh ikhlas dari hati yang paling dalam kupersembahkan karya tulis ini
untuk orang yang senantiasa mendukung dan mendoakan untuk kesuksesanku,
yang telah hadir di kehidupanku yang bahagia orang tuaku tercinta*

Ibunda Risna Wati

Ayahanda Wadan Nasution

*yang telah membimbingku dengan penuh cinta dan sabar dan tulus
membesarkanku sehingga aku dapat melanjutkan perguruan tinggi dan
menyelesaikan penulisan skripsi ini.*

*Serta terima kasih kepada seluruh keluarga besarku yang telah banyak berjasa
dalam hidupku dan senantiasa mendoakan keberhasilanku.*

YOU NEVER KNOW IF YOU NEVER TRY

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Wanda Putra
NPM : 1801280019
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : XIV
Tanggal Sidang : 30/08/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

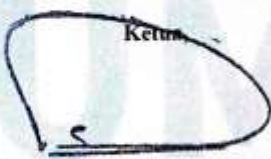
PEMBIMBING : Alfi Amalia, M.EI
PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M.EI
PENGUJI II : Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si







PANITIA PENGUJI


Ketua,
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA


Sekretaris,
Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wanda Putra
NPM : 1801280019
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Wanda Putra
NPM: 1801280019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : Wanda Putra
NPM : 1801280019
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

Medan, Agustus 2025

Pembimbing

Alfi Amalia, M.EI

DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, M.EI

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

WANDA PUTRA
NPM: 1801280019

Dosen Pembimbing:



Alfi Amalia, M.EI

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

Acc 16/8-2025

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

WANDA PUTRA

NPM: 1801280019



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, Agustus 2025

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Wanda Putra** yang berjudul **"Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



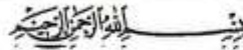
Alfi Amalia, M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8556/IAN-PT/Akred/PT/SH/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66234567 - 6631003
<http://faijumsu.ac.id> faijumsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggahlah karya-karya Anda di media sosial
Berani dan bertanggung jawab



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Wanda Putra
NPM : 1801280019
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perpektif Islam (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2025

Pembimbing

Alfi Amalia, M.EI

DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, M.EI

Dekan,



Assist. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	„	komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
---	-----	---	----

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong:

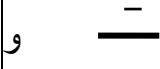
a. VokalTunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— —	fatḥah	A	A
— — —	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

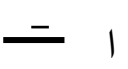
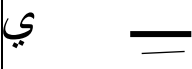
Z	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala: فَعَلَ
- Kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

	ḍammah dan wau	Ū	dan garis di atas
---	----------------	---	-------------------

Contoh: āla: قال Ramā: مار Qīla: قيل

d. Tamarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makata *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :

-raudah al-atfāl -raudatul atfāl: لروضة الأطفال

:al-munawwarahal-Madīnah: المدينة المنورة

-talḥah: طلحة

e. Syaddah(tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Ara dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā: ربنا

- nazzala: نزل

- al-birr: البر
- al-hajj: الحج
- nu'ima: نع

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

(I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh :

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوع
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harka* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamamuhammadunillarasūl
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihial-Qur'anū
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anū

- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin

- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib

- Lillahial-amrujami'an

- Lillahil-amrujami'an

- Wallahubikullisyai'in'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ASBTRAK

Wanda Putra, 1801280019. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam.

Pembimbing

Alfi Amalia, M.El

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat pemahaman dan pengetahuan tentang Strategi pengelolaan BUMDes untuk kesejahteraan Masyarakat dalam perspektif islam, Badan usaha milik desa yang ideal dapat menjadi poros kehidupan masyarakat desa, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan akses yang terbuka untuk semua masyarakat desa, dan sebagai agen pembangunan daerah serta menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan. karena sumber daya yang dimiliki oleh desa oleh karena itu di butuhkan strategi pengelolaan BUMDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan menekankan kedalaman data yang di dapatkan peneliti. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes di Desa Singkuang II. Pengelolaan BUMDes dengan tujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya dalam menyediakan modal dari unit usaha simpan pinjam dan penyediaan sewa Gedung dan kursi telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Akan tetapi belum membantu mensejahterakan Masyarakat secara signifikan karena hanya memenuhi indikator yang ada. Strategi pengelolaan BUMDes untuk kesejahteraan Masyarakat dalam perspektif islam dapat dikatakan sesuai dalam perspektif ekonomi Islam karena telah menyediakan manfaat untuk masyarakat yaitu dengan berupa penyediaan unit usaha simpan pinjam serta sewa gedung kursi, sehingga masyarakat di Desa Singkuang II juga dapat merasakan manfaatnya dan dapat memenuhi kebutuhannya secara Islam.

Kata kunci: *BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat, Strategi Pengelolaan.*

ASBTRACT

***Wanda Putra, 1801280019. Village-Owned Enterprise Management Strategy for
Community Welfare from an Islamic Perspective.***

Supervisor

Alfi Amalia, M.EI

This study aims to determine the benefits of understanding and knowledge about BUMDes management strategies for community welfare in an Islamic perspective. An ideal village-owned enterprise can be the axis of village community life, because its goal is to meet community needs, with open access for all village communities, and as a regional development agent and a driver for the creation of a corporate sector in rural areas. because the resources owned by the village therefore require a BUMDes management strategy. This study uses a qualitative approach, namely research on descriptive research that aims to explain the phenomenon as deeply as possible by emphasizing the depth of data obtained by researchers. This research was conducted at BUMDes in Singkuang II Village. BUMDes management with the aim of helping to ease the economic burden of the community, especially in providing capital from savings and loan business units and providing building and chair rentals has been felt to be beneficial by the community. However, it has not helped significantly improve community welfare because it only meets existing indicators. The BUMDes management strategy for community welfare from an Islamic perspective can be said to be appropriate from an Islamic economic perspective because it has provided benefits to the community, namely by providing savings and loan business units and renting out building chairs, so that the community in Singkuang II Village can also feel the benefits and can fulfill their needs in an Islamic manner.

Keywords: BUMDes, Community Welfare, Management Strategy.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia – Nya berupa kesehatan, kesempatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang judul **“Sistem Pengelolaan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabatnya, sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Strata – 1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami beberapa tantangan dan hambatan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang terkait, semuanya dapat teratasi dengan baik. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua terkasih Ayahanda Wadan dan Ibunda Risna Wati yang telah memberikan motivasi dan semangat serta do'a yang tulus dan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahma Yati, M.EI selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Alfi Amalia, M.EI selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing skripsi saya.
8. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di kehidupan sehari-hari serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Medan, Juni 2025
Peneliti

Wanda Putra
NPM: 1801280019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dan Perangkat Desa	26
B. Penelitian Tedahulu	29
C. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Dat	a33
F. Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
A. Strategi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat desa Singkuang II Mandailing Natal.....	39
B. Tinjauan Ekonomi Islam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal	47
D. Faktor Penghambat Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kesejahteraan masyarakat di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DOKUMENTASI	56

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Penduduk, Rumah Tangga (RT) dan Rata-Rata Rumah Tangga (ART) menurut Desa/Kelurahan Tahun 2025	37
Tabel II Jumlah Pendidikan Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis tahun 2025	38
Tabel III Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	38
Tabel IV Mata Pencanharian di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal	39
Tabel V Responden Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir	30
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan suatu desa dan kesejahteraan penduduknya, pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh seluruh penduduk Indonesia khususnya masyarakat desa dan dapat mengembangkan seluruh potensi desanya agar dapat dimanfaatkan sebab dengan adanya pendapatan yang baik maka kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi dan jauh dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Undang - Undang No 11 tahun 2009, Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun

politik. Namun kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara meningkatkan pemberdayaan daerah dan meninjau pembangunan – pembangunan yang ada di daerah tersebut.

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita – cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya Pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa, sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri.

Meninjau masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh desa yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diartikan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang akan menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, desa diharapkan akan menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

Pengelolaan desa melalui pemerintahan desa bertujuan untuk menciptakan desa yang lebih maju dan sejahtera masyarakatnya, dan hal itu merupakan impian dari semua pemerintah desa di Indonesia. Dalam Islam Perintah untuk sejahtera sudah dijelaskan dan merupakan suatu kewajiban setiap manusia untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashas [28]:77.

Desa Singkuang II merupakan salah satu desa di Kabupaten Mandailing Natal yang sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan mendorong pemerintah desa dan masyarakatnya untuk mendirikan dan menjalankan usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekaligus dapat menjadi sumber pendapatan asli bagi desa.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang dilakukan di Desa Singkuang II ini, diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Singkuang II telah menjalankan beberapa unit usaha, diantaranya yaitu:

1. Unit usaha konstruksi (penyewaan gedung, dan kursi)
2. Unit usaha simpan pinjam

Dalam pelaksanaan kegiatan menjalankan usaha yang ada di BUMDes Singkuang II, pemerintah desa melakukan pemberdayaan secara mandiri dengan melibatkan masyarakatnya langsung dalam pengelolaannya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan BUMDes diharapkan bukan hanya dapat membantu perekonomian masyarakat akan tetapi juga dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri. Selain itu juga diharapkan dengan adanya usaha BUMDes ini diharapkan dapat membantu memudahkan pemenuhan kebutuhan

bagi masyarakat.

Namun BUMDes di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal ini belum terlihat secara jelas peran dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar program BUMDes tepat guna dan tepat sasaran. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sejauh ini program pemberdayaan dan pembangunan yang ada belum melibatkan peran dan partisipasi masyarakat sepenuhnya, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam, Studi kasus di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Identifikasi Masalah

1. kondisi perekonomian masyarakat desa masih belum maju dan juga belum terlihat dengan jelas pengaruh dari BUMDes dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.
2. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa program pemberdayaan dan pembangunan yang ada belum sepenuhnya melibatkan peran masyarakat didalamnya, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
3. BUMDes juga diharapkan agar bisa membantu untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa sehingga desa menjadi desa yang mandiri, maju, serta sejahtera baik dalam hal ekonomi maupun pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dikajidalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatl di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal?

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi tentang konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang berharga bagi masyarakat dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai BUMDes.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bersifat praktis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Bisnis Syariah.

- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun melakukan penelitian yang sama dengan tinjauan yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Strategi pengelolaan

a. Pengertian

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan suatu pertempuran dengan sumber daya yang terbatas.

Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari suatu apa yang telah terjadi. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan program tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi dikatakan sebagai suatu proses penentuan rencana oleh pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, serta penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Dalam ekonomi Islam strategi dikenal dengan al-thariqah yaitu dapat diartikan sebagai "pendekatan" atau "metode" yang digunakan dalam menganalisis atau mengkaji isu-isu ekonomi. Pendekatan ini melibatkan serangkaian konsep, teori, dan prinsip yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah ekonomi. Dalam Islam, strategi merujuk pada perencanaan dan pengorganisasian langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi dalam Islam haruslah selaras dengan ajaran-ajaran agama dan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Saw telah memberikan ajaran bagaimana membangun strategi usaha yang bermoral.

Dan selaras dengan ajaran islam yang mengacu pada al-Qur'an dan hadist.

Masing-masing organisasi atau lembaga mempunyai tipe- tipe yang berbeda dalam menggunakan strategi. Tipe-tipe strategi menurut Rijiengkema yaitu sebagai berikut:

1). *Corporate strategy* (strategi organisasi)

Strategi ini berisi tentang landasan yang harus dilakukan dan untuk siapa strategi itu digunakan. Strategi organisasi adalah rencana terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Strategi ini melibatkan serangkaian keputusan yang diambil oleh manajemen tingkat atas yang mempengaruhi arah, sasaran, dan alokasi sumber daya organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya strategi organisasi, sebuah organisasi dapat mengarahkan upaya dan sumber daya mereka dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2). *Program strategy* (strategi program)

Strategi ini menjelaskan tentang dampak strategi terhadap suatu program yang dijalankan. Strategi program mengacu pada rencana dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang diambil untuk mengelola sumber daya, mengidentifikasi prioritas, dan mengarahkan upaya menuju hasil yang diinginkan. Strategi program mencakup langkah-langkah seperti analisis situasi, perumusan tujuan, penentuan target audiens, pemilihan metode dan pendekatan yang tepat, alokasi sumber daya, perencanaan tindakan, serta pemantauan dan evaluasi terus menerus (John Wiley & Sons, 2018, hal 50).

3). *Resource support strategy* (strategi pendukung sumberdaya)

Strategi ini memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi seperti tenaga kerja, teknologi dan lain sebagainya. Strategi pendukung sumber daya merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang

tersedia dalam suatu organisasi atau proyek. Sumber daya ini dapat mencakup sumber daya manusia, finansial, teknologi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dengan mengadopsi strategi pendukung sumber daya yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja mereka, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4). *Institutional strategy* (strategi kelembagaan)

Strategi ini berfokus pada ide pengembangan suatu organisasi. Strategi kelembagaan mengacu pada serangkaian langkah atau rencana tindakan yang dirancang untuk mengembangkan, memperkuat, atau mengubah struktur dan proses dalam sebuah lembaga atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi, memaksimalkan efisiensi dan efektivitas, serta meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan.

2. Konsep BUMDes

a. Pengertian BUMDes

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Herry Kamaroesid, 2016:2).

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usahaDesa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Agus Ahmad Safei, 2001:29).

Pada hakekatnya pembentukan BUMDes didasarkan pada potensi, kebutuhan, dan kapasitas desa, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti yang tertuang di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dengan didasari dengan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Coristya Berlian Ramadana dkk, 2013: Vol.1, No 6:1068-1076).

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes (Amalia, 2014, Vol V, No 1: 2).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).

- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) (Amalia, 2014, Vol V, No 1: 10).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

b. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk: (Kadek Sumiasih, 2018: 574).

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. (Herry Kamaroesid, 2016:18-19)

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

c. Peranan BUMDes

Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu;

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Seyadi, 2003: 16).

d. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Herry Kamaroesid, 2016: 13-16).

e. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- 1) Penasihat
- 2) Pelaksana Operasional, dan
- 3) Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Dept. Pend Nas, 2007: 13).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar.

Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

f. Keuangan BUMDes

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber- sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

g. Pertanggung jawaban Pelaksanaan BUMDes

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara ex-officio dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja

pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

h. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes (Herry Kamaroesid, 2016: 3-5).

1) BUMDes *Banking*

BUMDes yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.

2) BUMDes *Serving*

BUMDes *Serving*, mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDes atau PAM Des.

3) BUMDes *Brokering*

Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.

4) BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa yang ada di pulau Jawa. Contoh jenis usaha renting yaitu: penyewaan traktor, peralatan pesta, gedung pertemuan, rumah, toko, tanah maupun penyewaan mesin penggilingan.

5) BUMDes *Trading*

BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan

warga setempat.

i. Pembagian keuntungan

Pembagian hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha, pembagian keuntungan yang diberikan BUMDes jika sesuai peraturan yaitu 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 5% untuk sosialdari Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun. Bagi hasil BUMDes dialokasikan untuk: (Anom Srya Putra, 2015: 30)

- 1) Pendapatan desa
- 2) Pemupukan modal usaha
- 3) Pendidikan dan pelatihan pengurus
- 4) Penasehat
- 5) Pengelola/direktur
- 6) Kepala unit usaha dan karyawan
- 7) Pengawas
- 8) Dana Cadangan

3. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

1) Pengertian Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut (Ruddy Badrudin, 2012: 146). Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam (Anwar Abbas, 2008: 126).

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

2) Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Islam.

Untuk mengentaskan kemiskinan maka perlu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan- tujuan dari strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual (Fathurahman Djamil, 2013: 17).

Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya (Zainuddin Sardar, 2016, Vol 3 No 5: 391-401).

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa

(*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya” (Adiwarman, 2012: 62). Sedangkan menurut P3EI yang mengemukakan teori Umar Chapra kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu: (P3EI, 2009: 2).

3) Kesejahteraan holistik dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

4) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*)

Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Ekonomi islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu Ilahiyyah, akhlak, kemanusiaan, dan petengahan, dimana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi islam. Nilai- nilai ekonomi islam itu adalah: (Veithzal Rivai dkk, 2013: 91).

1) Ekonomi Ilahiyyah

Karena awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi dikaitkan pada prinsip Ilahiyyah dan tujuan Ilahiyyah, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mulk (67) ayat 15:

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

2) Ekonomi Akhlak

Ekonomi Akhlak yaitu ekonomi islam yang memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami. Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa yang diinginkannya atau apa yang menguntungkannya. Masyarakat muslim juga tidak bebas memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan, dan mengonsumsinya tetapi terikat oleh undang-undang islam dan hukum syariatnya.

3) Ekonomi Kemanusiaan

Merupakan ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiyyah dengan aspek Kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiyyah yang memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai Khalifah dimuka bumi.

4) Ekonomi Pertengahan

Merupakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.

b. Indikator Kesejahteraan

1) Indikator Kesejahteraan Secara Umum

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.

Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB kesarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern (Sub Direktorat Statistik, 2008: 4).

Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi: (Sub Direktorat Statistik, 2008: 17-18).

a) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut bisanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- Tinggi (Rp.>5.000.000)
- Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
- Rendah (< Rp.1.000.000)

b) Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tagga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yangmengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

c) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum- hukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategoripendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

d) Kesehatan

Menurut Menteri Kesehatan RI, Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah *Human Deveelopment Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), Pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

e) Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10M dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri. BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima tingkat kesejahteraan, yaitu: (Bungkaes dll, 2013:8)

1. Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung.
4. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan maupun ikut secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Keluarga sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan.

2) Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI, indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasacinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia.

Dengan demikian, Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki

kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kesempurnaan (*tahsiniyat*).

a) Kebutuhan pokok (*Ad-dharuriyat*)

Kebutuhan pokok dalam pemeliharaan lima tujuan syariat yaitu agama jiwa, akal, keturunan dan harta, dapat dijabarkan kebutuhan tersebut berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), serta kebutuhan pokok lain seperti pendidikan dalam pemenuhan pemeliharaan akal, serta kesehatan dalam pemenuhan jiwa.

b) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan hal yang penting untuk terpenuhi karena dalam beraktifitas manusia membutuhkan sandang atau pakaian untuk berpergian.

c) Kebutuhan Pangan/ Makan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting dan harus terpenuhi, karena manusia untuk bertahan hidup dan menjalani semua aktifitas kesehariannya harus memenuhi kebutuhan akan makan setiap harinya.

d) Tempat Tinggal

Rumah merupakan hal yang penting dalam sebuah keluarga sebagai tempat berlindung setiap harinya. Dikatakan sejahtera dalam hal ini apabila sudah menempati rumah sendiri, selain itu kondisi rumah yang sudah ditembok plester dan luas $8m^2$ untuk setiap satu anggota keluarga dan jenis lantai yang sudah disemen/ dikeramik.

e) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan dimana jiwa dan raga seseorang dalam keadaan yang baik untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

f) Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan serta pengetahuan seseorang yang akan berdampak terhadap perbaikan taraf hidup seseorang.

g) Kebutuhan sekunder (*Al-hajiyat*)

Kebutuhan sekunder juga penting dalam menunjang pemeliharaan 5 tujuan syariat, untuk menghilangkan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan. Kebutuhan sekunder seperti kebutuhan akan penerangan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari

h) Kesempurnaan (*Tahsiniyat*)

Kesempurnaan atau kebutuhan tersier berguna sebagai pelengkap dalam mencapai kesejahteraan seperti keindahan dan kenyamanan hidup. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dan sekunder.

4. Konsep Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa mencakup Kepala Desa dan aparatur Desa. Pemerintah desa ialah kewenangan pusat yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap tercapainya pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan Kepala Desa (pilkades).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seseorang kepala desa menjabat selama enam tahun untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya.

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan

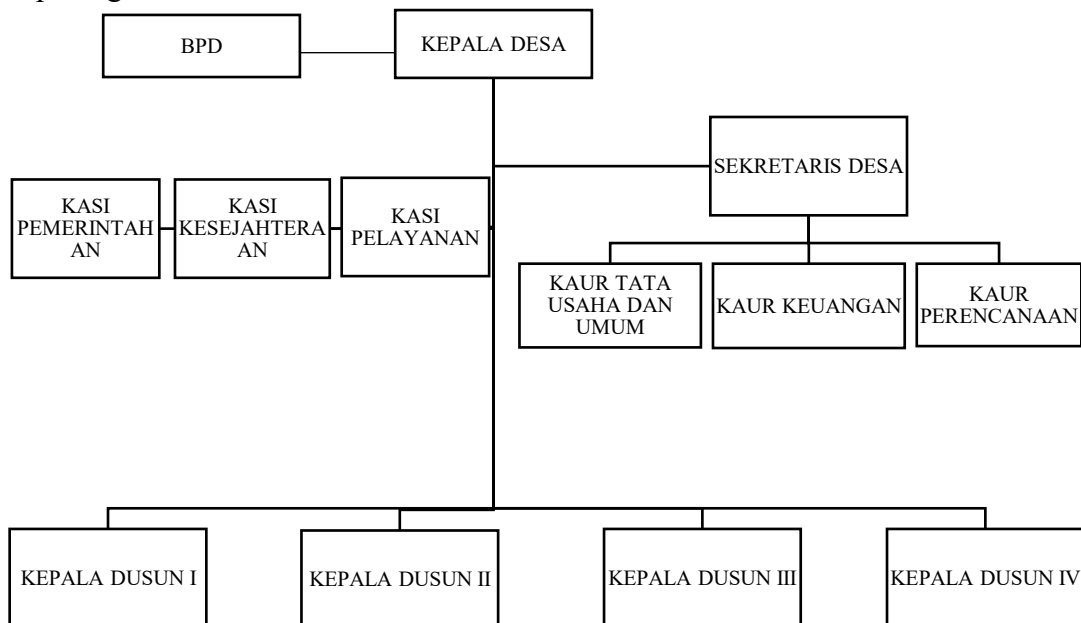
keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

b. Landasan Hukum Pemerintah Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Susunan organisasi pemerintah desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD. Susunan organisasi pemerintah desa tersebut dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dengan tembusan camat. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten, yang mana peraturan tersebut memuat materi antara lain mengenai susunan organisasi perangkat desa.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dan Perangkat Desa

d. Wewenang Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa mempunyai wewenang yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa; Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
7. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban, yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

f. Pertanggung Jawaban Kepala Desa

Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai laporan mengenai tugasnya kepada bupati. Pertanggung jawaban kepala desa disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran dan apabila pertanggung jawaban kepala desa di tolak oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus dilengkapi atau disempurnakan dan apabila telah dilengkapi atau disempurnakan tersebut tetap ditolak untuk kedua kalinya.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengusulkan pemberitahuan kepala desa kepada Bupati. Mekanisme seperti ini dilakukan agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintah yang dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi dan perwujudan di tingkat Desa).

B. Penelitian Tedahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Tahun
1.	Munawaroh	Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu).	2019
2.	Rismawati	Peranan BUMDes Perwitari dalam upaya meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.	2018
3.	Aya Aisyah	Peran UP2K Kemuning Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Keluarga Di Kelurahan Muncul Kecamatan Setu KotaTangerang Selatan.	2020
4.	Faskan Aditama	Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa (Studi Kasus Pengolahan Limbah Di Desa Daleman Kec. Tulung Kab. Klaten).	2019

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Munawaroh	Persamaan penelitian yang dilakukan saudara Munawaroh dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran BUMDes terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat desa.
2.	Rismawati	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas peran dari BUMDes kepada masyarakat desa.	Penelitian terdahulu membahas peran peningkatan ekonomi saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas peran dalam pemberdayaan masyarakat dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
3.	Aya Aisyah	persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas peran sebuah lembaga dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	lembaga dari penelitian terdahulu adalah UP2K yang mengurus usaha-usaha mikro keluarga, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4.	Faskan Aditama	persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas pemberdayaan masyarakat dan juga membahas BUMDes	Penelitian terdahulu membahas pemberdayaan berbasis potensi desa dengan studi kasus pengolahan limbah sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada peran BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat

C. Kerangka Berpikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi karangan (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelas atau ide bawahan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelas atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan paut dengan topik.

Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal”, sehingga untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan menekankan kedalaman data yang di dapatkan peneliti, semakin dalam dan detail data yang didapatkan maka semakin baik kualitas dari penelitian.

Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau obyek penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Usaha Milik Desa di Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian atau kegiatannya kurang lebih selama 1 Minggu.

C. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis ataupun lisan. Namun apabila peneliti menggunakan Teknik observasi, maka sumber datanya dapat berupa benda, gerak, atau proses sesuatu.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, bias anya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenom-ena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat Peran dan Kontribusi BUMDes secara *real* serta juga melihat kesejahteraan masyarakat Desa Singkuang II dengan adanya pengelolaan BUMDes disana.

2. Wawancara

Wawancara/interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis ialah masyarakat Desa Singkuang II maupun pengurus BUMDes.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis dari sumber utama data. Dokumen dalam penelitian ini buletin, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dalam jumlahnya yang sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam teknik reduksi data kegiatan yang perlu dilakukan adalah antara lain:

- a. mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3. Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan peran badan usaha

milik desa (BUMDes) diSingkuang II Kabupaten Mandailing Natal, khususnya mengenai peran BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclution*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui sari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Untuk menentukan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan.

Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan cara triangulasi agar data yang dihasilkan merupakan data yang valid untuk penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang valid.

Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Singkuang

Desa Singkuang merupakan desa yang berada di Kec. Muara Batang Gadis Kabupataen Mandailing Natal, tepatnya berada di pesisir barat. Setiap desa pada umumnya mempunyai kisah sejarah atau asal-usul nama desa. Mengenai sejarah tidak ada yang tau kepastian cerita, peneliti melakukan wawancara sehingga mendapatkan beberapa versi yang menjelaskan kenapa desa ini dinamakan Desa Singkuang.

Adapun menurut cerita masyarakat tentang sejarah Singkuang bahwasanya, Singkuang memiliki arti yakni sebuah dermaga. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang cina holin atau cina hitam sedang berlayar untuk mencari rempah rempah dan berlabuh di muara batang gadis (pertemuan air tawar dan air laut di lintasan pantai barat). Selanjutnya setelah cina holing tersebut berlabuh, cina holing tersebut membangun sebuah dermaga untuk tempat berlabuh kapal-kapal para pencari rempah-rempah. Dan pelabuhan tersebut dinamakan dan dikenal sebagai pelabuhan Singkuang (Kancil 2021).

bahwa nama Singkuang diambil dari kata SINGKUANG yang berasal dari bahasa china, arti dari Singkuang itu sendiri adalah “cahaya baru” orang china itu juga mengatakan bagi siapa saja yang tinggal di Singkuang maka kehidupannya akan berkembang dan memberi cahaya baru bagi kehidupan siapa saja yang tinggal di desa tersebut (Bakti 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat di Desa Singkuang II memiliki arti dari Sejarah Singkuang tidak la sama dan memiliki versi masing-masing. Adapun arti lain dari sejarah Singkuang seperti dikatakan dalam buku Prof. Haidar Putra Daulay, MA mengatakan:

Bangunnya Desa Singkuang sejak pertengahan abad ke Sembilan belas yakni ketika pindahnya Kuria Marangkat marga Daulay keturunan Ja

Inggal Inggal dari Desa Tanjung Sobar di pinggiran Sungai Batang Gadis ke Singkuang di tepi pantai Samudera India.

Berdasarkan di atas hingga saat ini nama Singkuang masih dipakai. Tetapi, karena adanya sebuah pemekaran Desa, Singkuang dibagi menjadi dua wilayah yakni Desa Singkuang I dan Desa Singkuang II.

2. Letak Geografis Desa Singkuang

Kondisi geografis merupakan salah satu bentuk yang jelas dari kawasan yang ada sekeliling kita atau hasil dari hubungan seseorang dengan kawasan sekelilingnya. Keadaan geografis juga memiliki sekat sekat, luas letak administrasi, serta kondisi iklim

. Desa Singkuang merupakan Ibu Kota Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal yang salah satu masuk dalam Propinsi Sumatera Utara. Kecamatan Muara Batang Gadis adalah salah satu Kecamatan yang paling jauh dari ibu kota Kabupaten Mandailing Natal yang berada sebelah utara dengan jarak tempuh 184 Km melalui jalan darat.

Secara administratif, Desa Singkuang II memiliki batas-batas wilayah yang telah diuraikan dibawah:

Sebelah Utara	: Berbatasan Dengan Desa Sulang Aling
Sebelah Selatan	: Berbatasan Dengan Desa Sikapas
Sebelah timur	: Berbatasan Dengan Desa Tabuyung
Sebelah Barat	: Berbatasan Dengan Desa Singkuang II

Desa Singkuang II memiliki luas wilayah 23 229,62 Ha.55 Sebagian besar lahan di Desa Singkuang II memiliki perkebunan Sawit milik PT. Swasta yang jenis tanamannya Sawit. Iklim Desa Singkuang II pada umumnya sama dengan di desa- desa lain yang berada diwilayah Indonesia yang mana beriklimkan musim hujan dan musim kemarau.

3. Demografis

Penduduk merupakan sumber daya yang sangat di perlukan bagi sebuah daerah dikarenakan syarat utama banggunya sebuah Negara hanya tentukan dengan adanya penduduk. Semakin besar jumlah penduduk disuatu daerah maka semakin besar harapan penyelenggaraan pemerintahan

serta pembangunan untuk perkembangan di daerah tersebut.

Adapun jumlah rincian penduduk Singkuang II yang jumlahnya kurang lebih 1.304 Jiwa, Rumah Tangga 320, dan Anggota Rumah Tangga 408.

Tabel I
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga (RT) dan Rata-Rata Rumah
Tangga (ART) menurut Desa/Kelurahan Tahun 2025

No	Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Anggota Rumah Tangga
1	Singkuang	1.304	320	408

Sumber: badan pusat Statistik Kab. Mandailing Natal Tahun 2025

Penduduk Desa Singkuang II yang dilihat dari sejarah, dicap oleh penduduk desa lain sebagai desa yang mengutamakan sifat kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam berkehidupan sehari-hari. Hal itulah yang mengakibatkan desa-desa lain yang berada di Kec. Muara Batang Gadis pada khususnya menjadi agak segan. Bahkan sampai saat ini sifat seperti itu masih ada yang tertanam pada sebagian masyarakat.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satunya hal sangat penting bagi perkembangan dan kehidupan untuk mencapai lebih baik lagi untuk kedepannya. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dapat menggambarkan tingkatan pendidikan di Desa Singkuang II yang digolongkan dari SD, SMP, dan SMA cukup tinggi, dan pada tingkat perkuliahan minat orang tua dalam menyekolahkan anaknya cukup tinggi, hal ini terlihat sejak dari anak tahun 70an dibuktikan dengan putra Desa Singkuang II cukup banyak yang berhasil baik dalam pemerintahan, pendidikan, dan politik.

Seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat di Desa Singkuang II besar kemungkinan telah mendasari berkurangnya sikap

premanisme kekerasan dari generasi ke generasi.

Tabel II
Jumlah Pendidikan Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang
Gadis tahun 2025

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	SDN 382 Singkuang	380
2	SDN 395 Singkuang	450
3	SMP NEGERI 1 MBG	570
4	PESANTREN MODREN AL-FATH	600
5	SMA NEGERI 1 MBG	750

Sumber: Kepala Sekolah SDN 382, 395, Pesantren Modren AL_Fath, SMPN dan SMAN 1 MBG

b. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Singkuang II 100 persen memeluk Agama Islam, dan masyarakat Singkuang II tidak ada yang menganut sama sekali Agama lain selain Agama Islam. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan apa-apa hasil dari wawancara yang akan dijelaskan melalui bentuk pada tabel sebagai berikut:

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Siswa
1	Islam	1.304
2	Kristen Katolik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Hindu	-
5	Buddha	-
6	Konghucu	-
	Jumlah	1.304

Sumber: wawancara Tokoh Agama Singkuang II

c. Keadaan Mata Pencaharian di Desa Singkuang

Melihat dari keadaan wilayah di Desa Singkuang II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal peneliti menemukan adanya suatu yang dimiliki yaitu potensi yang cukup baik, seperti tanah yang subur, laut yang luas, maka dari itu masyarakat Singkuang II bermata pencaharian ada sebagian Nelayan, Berkebun, dan Bertani, Pedagang, Peternak dan PNS.

Setelah masuknya perusahaan Swasta (PT. Swasta) masyarakat banyak memilih bekerja menjadi buruh harian lepas (BHL) di perusahaan perkebunan ini karena pekerjaan yang menjanjikan dalam setiap harinya mendapatkan gaji.

Tabel IV

Mata Pencaharian di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	150
2	Pedagang	45
3	PNS	16
4	Peternakan	20
5	BHL	25
6	Nelayan	30

Sumber: Wawancara dengan kepala kepala Desa Singkuang II

Berdasarkan tabel di atas, penghasilan penduduk desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal masih rendah atau minim. Bahkan penghasilan yang didapat hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, belum lagi kebutuhan pendidikan dan lainnya.

B. Strategi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat desa Singkuang II Mandailing Natal

1. Profil

Dalam penggalan data responden dilakukan sebagaimana dari kretria yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel V Responden Penelitian

No	Nama	Inisial	Kriteria
1	Yulis	Yul	Ketua
2	Rusdi	Rus	Sekretaris
3	Juneidi	Jun	Masyarakat Desa Singkuang II
4	Maroita	Mar	Masyarakat Desa Singkuang II
5	Kasaita	Kas	Masyarakat Desa Singkuang II
6	Solihin	Sol	Masyarakat Desa Singkuang II
7	Teguh	Teg	Masyarakat Desa Singkuang II
8	Wandi	Wan	Masyarakat Desa Singkuang II

Sumber: Telaah Data 2025

Berdasarkan hasil penggalan data dengan wawancara yang di laksanakan pada tanggal 1 agustus diawali dengan membahas latar belakang dibentuk nya BUMDes desa Singkuang II ini. Menurut Yulis latar belakang di bentuknya BUMDes Singkuang II ini yaitu di dasari dari undang-undang dengan tujuan untuk mengelola sumberdaya yang ada di desa dan menambah lapangan kerja baru serta menambah pemasukan desa dengan mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rusdi menambahkan latar belakang dibentuknya BUMDes ini yaitu Dengan adanya BUMDes Singkuang diharapkan bisa membantu masyarakat Desa Singkuang II untuk membangun usaha supaya masyarakat bisa mempunyai penghasilan dan dengan adanya BUMDes ini diharapkan bisa memberantas kemiskinan.

Adapaun menurut jun, mar, kas, sol, tag dan wan kurang lebih mengatakan hal yang sama bahwa latar belakang dibentuknya BUMDes ini yaitu untuk membantu Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa.

Dari pernyataan di atas latar belakang di bentuknya BUMDes untuk menciptakan lapangan kerja baru, serta membrantas kemiskinan, dan juga Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi

juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan manfaat bagi Masyarakat serta kesejahteraan bagi penduduk desa.

Jadi dapat di simpulkan bahwa BUMDes desa Singkuang II hanya memiliki 2 unit usaha yaitu usaha simpan pinjam dan sewa Gedung dan kursi. Yus mengatakan BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas terdapat dua unit usaha yang ada di BUMDes Singkuang II yaitu unit usaha simpan pinjam dan sewa Gedung kursi, dengan adanya unit Usaha simpan pinjam akan lebih berkembang atau meningkat apabila penawaran dan permintaan bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan usaha ditentukan oleh setiap elemen-elemen yang ikut aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya yaitu masyarakat.

Masyarakat harus memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mengembangkan usahanya. Setiap usaha memerlukan berbagai strategi yang digunakan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Singkuang II sedangkan untuk unit usaha sewa Gedung dan kursi telah membantu Masyarakat yang ingin mengadakan acara syukuran dan nikahan .

BUMDes Desa Singkuang II menggunakan strategi enterprise, strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat setiap organisasi mempunyai hubungan dengan Masyarakat. serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui simpan pinjam ini. Hal ini di sampaikan oleh Yus selaku ketua BUMDes Singkuang II.

Jadi dapat di simpulkan BUMDes Desa Singkuang II menggunakan *strategi Enterprise Strategy dan Corporate Strategy* dalam menjalankan BUMDes di desa Singkuang II strategi ini juga berkaitan dengan misi BUMDes Singkuang II itu sendiri. Salah satu misi BUMDes Singkuang II yaitu Pengentasan/pemberantasan kemiskinan di Desa Singkuang II Strategi ini juga

menampakkan bahwa anggota BUMDes Singkuang II sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat Desa Singkuang II.

Untuk unit usaha sewa Gedung dan kursi BUMDes Singkuang II telah menyediakan 1 gedung serba guna dan 500 kursi untuk disewakan kepada Masyarakat yang ingin mengadakan acara nikahan atau syukuran untuk membantu Masyarakat, Seperti yang telah di sampaikan oleh Yus selaku ketua BUMDes Singkuang II yaitu :

“disini untuk membantu kebutuhan Masyarakat BUMDes Singkuang II juga memiliki usaha unit sewa Gedung dan kursi yang terdiri dari Gedung serba guna serta 500 buah kursi yg bisa di pakai untuk acara-acara seperti pernikahan dan hajatan”

Menurut tanggapan saudara Jun selaku Masyarakat desa Singkuang II mengenai usaha sewa Gedung dan kursi ini :

“untuk sewa Gedung dan kursi ini sangat membantu sekali Masyarakat yang ingin mengadakan acara acara seperti acara pernikahan anaknya”

Berdasarkan pernyataan di atas manfaat dari BUMDes telah dirasakan Masyarakat, serta Masyarakat Desa Singkuang II sangat bersyukur dengan adanya BUMDes sebab dengan adanya BUMDes tersebut bisa membantu dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat tersebut. Dengan pengelolaan BUMDes yang baik sangatlah penting sebab BUMDes tersebut menjadi faktor utama bagi masyarakat yang ingin membuka usaha nya supaya bisa membantu untuk berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari hari, jadi masyarakat tidak akan menganggur dirumah saja. Pengelolaan yang baik akan menjadi indikator pertama bagi masyarakat dalam peningkatan perekonomiannya.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang umum ada di setiap BUMDes, akan tetapi strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu dengan tujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya dalam menyediakan modal dari unit usaha simpan pinjam dan penyediaan sewa Gedung dan kursi

telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Strategi Pengelolaan

Untuk melihat indikator strategi, BUMDes menerapkan empat fungsi pengelolaan yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning/Perencanaan merupakan satu proses untuk kebutuhan serta sasaran yang ingin dicapai:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap pertama ini menetapkan tujuan awal dalam pengembangan badan usaha milik Desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga khususnya di bidang usaha ekonomi. Namun di sisi lain dengan adanya BUMDes ini mampu memberikan tambahan pendapatan Desa. Untuk mengembangkan BUMDes maka pengelola melakukan identifikasi potensi desa untuk mengetahui aset apa yang dimiliki oleh Desa yang nantinya mampu untuk dikembangkan dan menambah pendapatan Desa.

Ada beberapa unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Singkuang II yaitu diantaranya:

a. Simpan pinjam

Untuk perencanaan awal BUMDes desa Singkuang II yaitu dengan menyiapkan modal awal. dan menentukan kordinatornya.

b. Sewa gedung kursi

Untuk unit usaha ini pengurus BUMDes telah menyiapkan sebuah gedung serbaguna dan 500 kursi. Serta menentukan kordinatornya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengorganisasian ini pihak BUMDes Singkuang II membentuk organisasi dengan tujuan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas dan tanggung jawab ini dilakukan oleh pengelola BUMDes Singkuang II. Di dalam struktur organisasi BUMDes yang memiliki kedudukan tertinggi yaitu kepala desa Singkuang II yaitu bapak Osriadi yang memiliki fungsi

untuk memberikan masukan, arahan dan bimbingan yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan BUMDes.

BUMDes Singkuang II juga memiliki beberapa pengawas yang memiliki kewenangan untuk melihat, meneliti, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja operasional maupun administrasi BUMDes. Pihak pengelola BUMDes bertanggung jawab kepada pengawas atas segala kegiatan yang dilakukan BUMDes Ujanmas lama. Dalam pengelolaannya, para pengelola mendapatkan bantuan pemuda karang taruna dan juga masyarakat desa Singkuang II.

3. Pelaksanaan (*Aktuating*)

Menurut ketua BUMDes Singkuang II proses pelaksanaan adalah tahap implementasi rencana kerja yang telah direncanakan dan bisa dijalankan oleh semua pihak organisasi dan merupakan sebuah motivasi agar pihak lain melakukan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan tingkat produktivitas yang tinggi. dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan harus ada kerjasama antara beberapa pihak yaitu pihak pengelola BUMDes, masyarakat desa dan pihak-pihak lain, hal ini dilakukan untuk mengembangkan jenis usaha dan mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pada proses pengawasan digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah di rencanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengelola. Disini peran pemerintah desa memberikan arahan, kebijakan dan bimbingan atas pengelolaan yang telah dilaksanakan. Kemudian tugas dari pengawas adalah meneliti, memeriksa dan mengevaluasi atas kinerja yang dilakukan oleh pengelola BUMDes selama ini. Dan pihak pengelola bertanggung jawab penuh kepada pemerintah desa terkait dengan pengelolaan BUMDes Singkuang II.

Jadi dapat disimpulkan Dalam strategi pengelolaan nya BUMDes Singkuang II sudah sesuai dengan strategi yang ada, dibuktikan dengan

semua indikator strategi yang terpenuhi dan Terdapat berbagai macam indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

- 1) Tinggi (Rp.5.000.000)
- 2) Sedang (Rp.1.000.000-Rp.5.000.000)
- 3) Rendah (<Rp.1.000.000)

Sebagian besar Masyarakat Singkuang II berprofesi sebagai petani dan pekebun jumlah petani di desa Singkuang II lumayan Banyak yang di dominasi dengan petani padi selain petani Masyarakat desa Singkuang II ada juga yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, petani, buruh, dan lain sebagainya. Banyak dari para petani yang juga memiliki usaha/pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarganya agar tercukupi.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan warga Desa Singkuang II yakni Ayib yang tidak bergabung didalam unit usaha BUMDes, beliau menjelaskan bahwa:

“saya seorang petani dan saat ini kami di sadap oleh buruh dengan sistem upah selain itu kami memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari “

Pernyataan dari Masyarakat lain yaitu Jun mengatakan: “saya dulu nya petani dikarenakan faktor usia sekarang saya hanya dirumah membuka warung kecil-kecilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari”

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan informan-informan yang ada di Desa Singkuang II. sebagian besar masyarakat penghasilan perbulannya berkisar Rp.500.000- Rp.700.000 yaitu kurang

dari Rp.1.000.000, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Singkuang II. ini adalah sebagai petani. Sehingga masih banyak masyarakat yang pendapatannya rendah. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang berpendapatan sedang perbulannya.

b. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga adalah salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Pengeluaran masyarakat di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan serta barang-barang bukan pangan. Proporsi pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga Masyarakat Desa Singkuang II Dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya tidak selalu sama.

Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada pula yang rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat.

Disinilah peran BUMDes Singkuang II sangat membantu masyarakat, dimana masyarakat khususnya kaum wanita bisa menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan yang diadakan oleh BUMDes Singkuang II. Menurut Ra salah seorang masyarakat Desa sebagai berikut:

Dengan adanya pengelolaan yang baik dapat membuat keputusan yang lebih terkait investasi pembiayaan, dan pengelolaan aset tersebut (Dilla Ariska,Alfi Amelia).

pelatihan pembuatan kerajinan tangan yang diadakan oleh BUMDes Singkuang II alhamdulillah saya bisa punya kerjaan sampingan untuk menambah penghasilan selain berjualan untuk bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDES berbasis syariah nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara menyeluruh, dengan mengedepankan kekeluargaan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam.

Adanya Tinjauan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridha Allah SWT.

Hal ini seperti yang dikatakan Allah dalam Al Qur'an surat Al Mulk a yang artinya :

yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela.

yang mensyaratkan dipenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Bila perbuatan manusia memenuhi dua syarat itu sekaligus, maka amal itu tergolong ahsan (ahsanul amal), yakni amal terbaik di sisi Allah SWT.

BUMDes Desa Singkuang II menggunakan *strategi Enterprise Strategy* dan *Corporate Strategy*. *Enterprise Strategy* merupakan strategi dalam hal pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dimana para anggotanya harus bersungguh sungguh dalam bekerja dan

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. *Enterprise Strategy* ini sangat erat kaitannya dengan Islam, karena Islam mengajarkan untuk berlaku baik terhadap sesama muslim.

Corporate Strategy merupakan strategi yang berkaitan dengan misi organisasi, dimana misi organisasi BUMDes Desa Singkuang II yaitu dalam rangka mengentaskan atau memberantas kemiskinan dan membantu masyarakat yang tidak memiliki modal usaha. *Corporate Strategy* ini sangat erat kaitannya dengan Islam, karena Islam mengajarkan untuk bersikap saling tolong menolong sesama umat muslim.

Dalam hal pengelolaan, BUMDes menerapkan empat fungsi pengelolaan yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. BUMDes Desa Singkuang II dengan cara mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang dilakukan BUMDes Desa Singkuang II yaitu lebih mengembangkan usaha ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Perencanaan seperti inilah yang sangat membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya, jadi dalam Islam perencanaan seperti ini dibolehkan karena ada sikap saling tolong menolong atau sikap membantu masyarakat demi kemaslahatan bersama.

Dalam Islam kesejahteraan tidak diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti spiritual, nilai-nilai moral dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki tingkat kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuan Islam As-Syathibi membagi kebutuhan dasar menjadi tiga yaitu al-dharuriyah (kebutuhan primer) dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dipenuhi atau dimiliki oleh diri manusia. Memenuhi kebutuhan juga telah Allah firmankan pada Q.S Fussilat yang artinya:

Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan dalam islam yaitu ada tiga yakni al-dharuriyyah (kebutuhan primer), al-hajjiyyah yaitu kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. dan al tshaniyyah adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

D. Faktor Penghambat Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kesejahteraan masyarakat di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hal ini dapat juga digambarkan faktor penghambat dalam sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberayaan Masyarakat di Desa Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal adalah lokasi yang sulit di jangkau, infrastruktur jalan dan kurangnya kesadaran masyarakat petani terhadap kualitas dari hasil pertanian mereka.

Adapun wawancara dengan kepala Desa Singkuang II yang mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambat yaitu lokasi yang terpencil sehingga jarak antara lokasi BUMDes atau tempat usaha dengan konsumen cukup jauh kemudian infrastruktur jalan menuju Desa Singkuang II ini juga kurang mendukung sehingga untuk pemasaran hasil produk BUMDes sedikit terhambat”.

Hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penjualan hasil dari produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Singkuang II adalah jarak antar kosumen yang cukup jauh kemudian infrastruktur jalan menuju Desa Singkuang II juga kurang mendukung. Wawancara diatas tidak jauh beda dengan yang dikatakan oleh ketua BUMDes yang mengatakan bahwa:

Faktor penghambatnya yaitu lokasi Desa Singkuang II ini cukup jauh

dari konsumen sehingga untuk penjualan produk dari BUMDes kami sedikit terhambat. kami juga bekerjasama dengan beberapa warkop yang ada di desa-desa lain yang jaraknya cukup jauh dari lokasi BUMDes ini.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jarak antara desa ke desa lain dengan lokasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Singkuang II cukup jauh jadi penjualan hasil produk BUMDes Singkuang II sehingga terkendala karena lokasinya cukup jauh dari konsumen.

Wawancara dengan pengelola BUMDes Singkuang II yang mengatakan Bahwa:

“Pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singkuang II yang menjadi hambatan kami yaitu hasil panen dari petani padi karena tidak sedikit petani padi yang melakukan panen sebelum masa panen itu sendiri sehingga ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari produk kami”.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, masih banyak petani padi yang kurang menyadari bahwa hasil panen sangat berpengaruh terhadap hasil produk padi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singkuang II.

Pengelola lain membenarkan hal itu, pengelola tersebut mengatakan bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam proses pengolahan padi yaitu karna masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan hasil panen mereka, biar yang belum matang di panen mi juga jadi ini menyulitkan kami karena kami harus memisahkan terlebih dahulu antara yang matang dengan yang mentah karna kalau dicampur ini akan berpengaruh terhadap kualitas produk kami.

Hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa, kesadaran masyarakat terhadap kualitas dari hasil panen mereka sangat berpengaruh terhadap produk padi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singkuang II sehingga pengelola harus memisahkan terlebih dahulu antara padi yang sudah matang dengan yang belum demi menjaga produk yang dihasilkan oleh BUMDes Singkuang II Kabupaten Mandailing Natal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument

kesejahteraan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Kesejahteraan ekonomi ini berpotensi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi.

Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan strategi pengelolaan badan usaha milik desa terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif islam, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa Desa Singkuang II menerapkan empat strategi pengelolaan yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling dengan tujuan untuk meringankan kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu beban ekonomi masyarakat.
2. Tinjauan ekonomi islam Badan Usaha Milik Desa Desa Singkuang II untuk memenuhi kesejahteraan Masyarakat telah memberikan manfaat tapi belum sesuai dengan nilai nilai ekonomi Islam yang sepadan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa tersebut.
3. Dalam pelaksanaan Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang telah disediakan. Walaupun ada beberapa faktor penghaambat seperti kondisi infrastruktur jalan serta lokasi BUMDes Singkuang II yang memiliki jarak cukup jauh.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan tentang strategi pengelolaan badan usaha milik desa terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif islam di desa singkuang II kabupaten mandailing natal, maka penulis akan memberikan saran yang mungkina dapat membangun dan bermanfaat antara lain :

Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Singkuang bertujuan untuk meringankan kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi Masyarakat telah memberikan manfaat dengan nilai nilai ekonomi Islam yang sepadan

dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa, tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang telah disediakan Badan Usaha Milik Desa dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), H. 62
- Agus Ahmad Safei, *Pembangunan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2019), hlm. 29
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h. 30
- Anwar Abbas, *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Indo, 2016), h.126
- Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2018
- A Husna, MA Lubis, M Ruslan,- *Proceeding Internasional Seminar Of Islamic Studies*, 2025
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo,” Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No .6, hlm. 1068-1076
- Departement Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan PengelolaanBUMDes*, 2017, h. 13
- Dilla Ariska, Alfi Amalia, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JSAB)*. 2025
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Rafika Aditama, 2015), h. 133-134
- Faisal Basri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah- Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan ProspekPerekonomian Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 451
- Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 17.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulatdan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo,2017), h. 4.
- Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, “*Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkaan Kesejahteraan*

Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaund”, Journal Acta Diurnal Edisi (april 2019), h.8.

Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: MitraWacana media), h. 2

Isra Hayati, MD Tufail,- *MODELING : Jurnal Program Studi PGMI*, 2025

Kadek Sumiasih, *Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, h. 574

Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 10

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia*, h.13.

Riyan Pradesyah, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jurnal Prodikmas (2018)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 2.

Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), h.146

Seyadi, *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. (Yogyakarta: UPP STMYKPN, 2018), h. 16

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hal.243

Sub Direktorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2018, h.4

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, *Kesejahteraan Sosial*, Pasal 1 ayat (1).

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.91.

Ziauddin Sardar, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016: 391-401.

Sugiyono, (2019) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,)

Rahmayati, *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3,427-432, 2022.

Rio Haloman, 2017. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Badan Usaha*

Milik Desa di Kabupaten Rukan Hulu Tahun 2012-2014. Jurna Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol. 4 No.1 – Februari 2017.

DOKUMENTASI





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8958/BBAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Bauri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax, (061) 6623474, 6631003
@umsu.ac.id f @umsu.ac.id i umsmedan o umsmedan u umsmedan u umsmedan

Uraian mengenai surat ini agar diketahui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

07 Ramadhan 1446 H
07 Maret 2025 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wanda Putra
NPM : 1801280019
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,38



Mengajukan judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Analisis Penerapan Manajemen Bisnis Syariah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Singkuang II).	-	-			
2	Penerapan Etika Bisnis Syariah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Singkuang II Kec. Muara Batang Gadis.	-	-			
3	Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam. (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal).	✓	-	Alf 3-3-7625	Alf 3-3-7625	34

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Wanda Putra

Keterangan:
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak

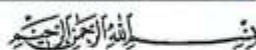


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8956/BAN-PT/Akred-PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsuamedan)

Unggah Laporan Tahunan
Pusat Pengabdian Masyarakat
Pusat Penelitian dan Pengembangan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.EI
Dosen Pembimbing : Alfi Amalia, M.EI

Nama Mahasiswa : Wanda Putra
Npm : 1801280019
Semester : XIV
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/08/2025	Revisi BAB IV	Al	
12/08/2025	Tambahkan Referensi Dosen FAI min 5.	Al	
13/08/2025	Revisi Tabel-tabel	Al	
14/08/2025	Revisi BAB V	Al	
15/08/2025	Perbaiki kesimpulan dan saran	Al	
16/08/2025	ACC	Al	

Medan, 16 Agustus 2025

Diketahui/Ditetapkan
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Ditetapkan
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.EI

Pembimbing Skripsi

Alfi Amalia, M.EI



UMSU
Bergerak untuk kemajuan umat

Wala'au lillahi wa'alaihi raji'un

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/NK/EAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 26 Juni 2025 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wanda Putra
Npm : 1801280019
Semester : XIV
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, Kamis 26 Juni 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari S.E, S.Sy, M.Si)

Pembimbing


(Alfi Amalia, M.Ed)

Pembahas


(Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.8156/SK/AN-P/1/Akro/PE/10/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuonline](#) [umsuonline](#) [umsuonline](#)

UIN Muhammadiyah Sumatera Utara
Bismillah dan Bismillah

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Kamis 26 Juni 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wanda Putra
Npm : 1801280019
Semester : XIV
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

Disetujui/ Tidak disetujui :

Item	Komentar
Judul	Perbaiki Kata pengantar
Bab I	Perbaiki identifikasi masalah Ratasan masalah dihapus
Bab II	perbaiki penelitian terdahulu
Bab III	perbaiki kerangka berpikir
Lainnya	perbaiki jadwal penelitian perbaiki daftar pustaka, minimal masa 10 thn.
Kesimpulan	Lulus ☒ Tidak Lulus ☐

Medan, Kamis 26 Juni 2025

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Isra Hayati S.E., M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari S.E., S.Sy., M.Si)

Pemimbing

(Alfi Amalia, M.EI)

Pembahas

(Dr. Isra Hayati S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8956/KAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Dasar pengantar yang ini juga disahkan
Bersama dan langgarnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.
Dosen Pembimbing : Alfi Amalia, M.EI.

Nama Mahasiswa : Wanda Putra
Npm : 1801280019
Semester : XIV
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/03/2025	Revisi BAB I	Il	
27/03/2025	Tambahan penelitian terdahulu dan deskripsikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini	Il	
03/05/2025	Tambah analisis kesesuaian data	Il	
16/05/2025	Revisi BAB III	Il	
14/06/2025	Acc Seminar	Il	

Medan, 4 Juni 2025



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.

Pembimbing Proposal

Alfi Amalia, M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK/Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fa.umsu.ac.id>

fa@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Bila mendapat surat ini agar diteliti dan tanggapnya

Nomor : 520/II.3/UMSU-01/F/2025
Lamp : -
Hal : Izin Riset

30 Muharram 1447 H
25 Juli 2025 M

Kepada Yth :
Kepala Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Wanda Putra
NPM : 1801280019
Semester : XIV
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Singkuang II Kab. Mandailing Natal)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



Prof. Dr. Zailani, MA
NIDN : 0108108003

Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
DESA PASAR SINGKUANG II**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.4/228/KD/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pasar Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa:

Nama : WANDA PUTRA
NIK : 1213171503000001
NPM : 1801280019
Tempat, Tgl. Lahir : Singkuang, 09 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Bisnis
Alamat : Desa Pasar Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

Benar telah melakukan Studi Khusus mulai tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2025 di Desa Pasar Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan judul Penelitian Kualitatif "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Singkuang II, 19 Agustus 2025
Kepala Desa Pasar Singkuang II

SAUBAN HASIBUAN, S.Pd.I